

ANALISIS KINERJA PENDAPATAN PADA DINAS PENGELOLAH KEUANGAN ASSET DAN PENDAPATAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN

ANALYSIS PERFORMANCE REVENUES IN THE FINANCIAL MANAGEMENT OFFICE OF ASSET AND REVENUE IN SOUTH MINAHASA DISTRICT

Oleh:
Lady Lampa,
Harijanto Sabijono

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail : ¹lampalady@gmail.com
²h.sabijono@yahoo.com

Abstrak: Salah satu misi untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia, perwujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan daerah. Sebagai prasyarat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah bagaimana dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerah, baik melalui dana perimbangan maupun pendapatan asli daerah. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pengelolah Keuangan Asset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kinerja Pendapatan pada Dinas Pengelolah Keuangan Asset dan Pendapatan di Kabupaten Minahasa Selatan. Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan rasio keuangan yang meliputi analisis varians anggaran pendapatan, pertumbuhan pendapatan, derajat, desentralisasi, kemandirian daerah, dan efektivitas pendapatan asli daerah (PAD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan dilihat dari analisis varians dari tahun 2008-2011 belum sepenuhnya tercapai hanya pada tahun 2008 target anggarannya bisa tercapai, sedangkan pertumbuhan pendapatan cukup baik meskipun sempat turun 2% pada tahun 2010. Sebaiknya pimpinan dinas pengelola keuangan asset dan pendapatan kabupaten minahasa selatan mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang ada, agar target pajak dan retribusi daerah dapat tercapai.

Kata kunci: arus kas, rasio keuangan, kinerja pendapatan

Abstract: One of the missions to realize the vision of Indonesia, the embodiment of regional autonomy within the framework of regional development and equitable growth in the region. As an important prerequisite in the implementation of regional autonomy, how do efforts to increase revenues or revenues, either through the fund balance and revenue. This research was conducted at the Department of Financial Management Asset and Revenue South Minahasa regency. The purpose of this study to determine the Revenue Performance Management Agency of Financial Asset and Revenue in South Minahasa regency. Data analysis method used was qualitative approach using financial ratio analysis of variance budget includes revenue, revenue growth, the degree of decentralization, local independence, and effectiveness of local revenue (PAD). The results of this study indicate that revenue performance seen from the analysis of variance for 2008-2011 have not been fully achieved only in the year 2008 budget targets can be achieved, while revenue growth was quite good although it was down 2% in 2010. Should the leader of the management department of financial assets and income South Minahasa district optimize the collection of taxes and levies in accordance with the existing potential, in order to target taxes and levies can be achieved.

Keywords: cash flow, financial ratio, revenue performance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia, hirarki pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah setidaknya terbagi lagi atas pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Otonomi daerah yang sedang terus bergulir, sebagai bagian dari adanya reformasi pengelolaan pemerintahan di daerah, oleh pemerintah pusat telah di tampung dalam UU No. 32/2004 tentang pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah telah mulai diberlakukan sejak tahun 2001.

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapabilitas dan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, pada kenyataannya, pemerintah daerah umumnya belum menjalankan fungsi dan peranan secara efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi seperti ini muncul karena pendekatan umum yang digunakan dalam penentuan besar alokasi dana untuk setiap kegiatan adalah pendekatan incremental, yang didasarkan perubahan satu atau lebih variable yang bersifat umum seperti tingkat inflasi dan jumlah penduduk. Selain itu, pendekatan lain yang digunakan adalah *Line-item* yaitu perencanaan anggaran yang didasarkan atas pos anggaran yang telah ada sebelumnya (Halim 2012:23).

Anggaran merupakan rencana jangka pendek organisasi yang dinyatakan dalam bentuk keuangan. Anggaran sektor publik yang di presentasikan dalam APBN dan APBD menggambarkan tentang rencana keuangan dimasa datang mengenai jumlah pendapatan, jumlah belanja, surplus/ defisit, pembiayaan, serta program kerja dan aktivitas yang akan dilakukan.

Dinas pendapatan daerah (DISPENDA) Kabupaten Minahasa Selatan, adalah salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah yang merupakan bagian dan pelengkap dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah. Untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah memerlukan dana yang besar, namun kemampuan keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Pendapatan pada Dinas Pengelolah Keuangan Asset dan Pendapatan di Kabupaten Minahasa Selatan.

Landasan Teori

Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik yang di presentasikan dalam APBN dan APBD menggambarkan tentang rencana keuangan dimasa datang mengenai jumlah pendapatan, jumlah belanja, surplus/deficit, pembiayaan, serta program kerja dan aktivitas yang akan dilakukan (Mahmudi 2011:60). Mahsun (2006:50) mengatakan anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan seperti listrik, air, kualitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat.

Fungsi Anggaran Sektor Publik

Mahsun (2006:50-51) mengatakan Anggaran Sektor Publik memiliki beberapa fungsi utama yaitu :

- a. Anggaran sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*)
Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.
- b. Anggaran sebagai alat pengendalian (*Control Tool*)

Sebagai alat pengendalian yang digunakan untuk menghindari dan membatasi adanya pengeluaran / belanja lebih, pengeluaran belanja kurang dan pengeluaran / belanja yang salah sasaran yaitu alokasi pada bidang yang lain yang bukan prioritas.

c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

d. Anggaran sebagai alat politik (*Political Tool*)

Anggaran merupakan bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu sehingga kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menurunkan kredibilitas pemerintah.

e. Anggaran sebagai alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)

Anggaran berfungsi sebagai alat koordinasi dan komunikasi antara bagian dalam pemerintah sehingga anggaran yang baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan.

f. Anggaran sebagai alat penilaian kerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran merupakan bentuk komitmen dari eksekutif kepada pemberi wewenang (legislatif) maka kinerja eksekutif dapat dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

g. Anggaran sebagai alat motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran dapat digunakan untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (*Public Sphere*)

Anggaran bisa berfungsi sebagai media bagi masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan untuk memonitor dan menyoroti rencana keuangan pemerintah sehingga mereka bisa menyampaikan suara mereka.

Prinsip Anggaran Sektor Publik

Prinsip-prinsip anggaran sektor publik menurut Nafarin (2007:9) prinsip anggaran sebagai berikut :

- a. Otorisasi legislatif
- b. Komprehensif
- c. Keutuhan
- d. *Nondiscretionary / Appropriation*
- e. Periodik
- f. Akurat
- g. Jelas
- h. Transparan

Tujuan Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2009:68) mengatakan proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan yaitu :

- a. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah.
- b. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
- c. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
- d. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR / DPRD dan masyarakat luas.

Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik

Nordiawan (2006:69-74) mengatakan ada 5 jenis anggaran sektor publik yaitu sebagai berikut :

- a. *Line Item Budgeting*
Dengan system *line item budgeting*, kinerja anggaran diukur berdasarkan tingkat serapan anggaran. Kemampuan menghabiskan atau menyerap anggaran menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan organisasi. Sebagai akibatnya dalam praktik sering terjadi perilaku birokrat yang selalu berusaha untuk menghabiskan anggaran tanpa melihat hasil dan kualitas (Bastian,2006).
- b. *Incremental Budgeting*
Incremental Budgeting merupakan system penganggaran yang hanya menambah atau mengurangi jumlah anggaran dengan menggunakan data anggaran tahun lalu sebagai dasar perencanaan tahun sekarang, atau anggaran tahun sekarang sebagai dasar perencanaan anggaran tahun depan. *Incremental Budgeting* digunakan untuk kegiatan yang selalu ada atau rutin dilakukan setiap tahun atau untuk program dan kegiatan yang berlanjut dari tahun sebelumnya.
- c. *Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS)*
PPBS merupakan system penganggaran yang penyusunan anggarannya berdasarkan program. Setiap unit kerja memiliki visi, misi, tujuan dan strategi organisasi yang dituangkan dalam renstra unit kerja. Renstra unit kerja kemudian dijabarkan dalam rencana operasional yang berisi program kerja beserta target kerjanya.
- d. *Zero Based Budgeting (ZBB)*
Zero Based Budgeting (ZBB) merupakan system penganggaran yang berbasis nol atau mulai dari nol. ZBB menjadikan anggaran tahun lalu sebagai dasar penyusunan anggaran tahun sekarang. Kelebihan ZBB antara lain anggaran didasarkan kebutuhan riil bukan sekedar mengulang dan meneruskan program lama sehingga hal ini dapat mengurangi terjadinya duplikasi dan pemborosan anggaran. Kelemahan ZBB cukup rumit penyusunannya dan sulit dalam implementasinya.
- e. *Performance Budget*
Performance Budget atau anggaran berbasis kinerja merupakan system, penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

Karakteristik Anggaran Kinerja

Karakteristik anggaran kinerja menurut Adisamita, (2011:8) yaitu :

- a. Mengklasifikasikan akun-akun dalam anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas dan juga berdasarkan unit organisasi dan rincian belanja.
- b. Menyelidiki dan mengukur aktivitas guna mendapatkan efisiensi maksimum dan untuk mendapatkan standar biaya.
- c. Mendasarkan anggaran untuk periode yang akan datang pada biaya per unit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang diperkirakan harus dilakukan pada periode tersebut.

Anggaran kinerja melakukan pengklasifikasian akun-akun dalam setiap anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitasnya, mengukur seluruh aktivitas dengan menggunakan standar biaya untuk memperoleh efisiensi yang maksimal dan anggaran yang disusun berdasarkan pada perkiraan biaya per unit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang akan dilakukan dalam periode tersebut.

Struktur APBD

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Daerah
- b. Belanja Daerah
- c. Pembiayaan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang mencakup :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD);
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN); dan
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta
- d. Lain-lain PAD yang Sah, yang meliputi :
- e. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- f. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- g. Jasa giro;
- h. Pendapatan bunga;
- i. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah;
- j. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- k. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- l. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- m. Pendapatan denda pajak dan retribusi;
- n. Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- o. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- p. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Laporan Keuangan Untuk Pengukuran Kinerja

Pengukuran dan evaluasi kinerja keuangan dapat dilakukan dengan memanfaatkan data dan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan. Adapun metode atau teknik analisis laporan keuangan terdapat beberapa cara, antara lain (Mahmudi 2011 : 162) yaitu :

a. Analisis Varians (Selisih)

Analisis Varians dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yaitu dengan mengukur tingkat selisih baik menguntungkan ataupun yang tidak menguntungkan antara realisasi dengan anggaran. Varians pendapat diperoleh dengan cara :

Varians Pendapatan

$$\text{Varians} = \text{Realisasi Tahun } t - \text{Anggaran Tahun } t$$

Persentase Varians Pendapatan

$$\text{Varians Pendapatan Tahun } t = \frac{\text{Realisasi Tahun } t}{\text{Anggaran Tahun } t} \times 100\%$$

b. Analisis Pertumbuhan

Analisis Pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan serta kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu (Mahmudi 2011 : 162).

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan Thn } t - \text{Pendapatan Thn } t - 1}{\text{Pendapatan Tahun } t - 1} \times 100\%$$

c. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan menurut (Mahmudi 2011 : 163) :

1) Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah (Mahmudi 2011 : 169).

$$\text{Derajat desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2) Rasio Keuangan Daerah

Rasio keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah (Mahmudi 2011 : 170) :

$$\text{Rasio Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

3) Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan (Mahmudi 2011 : 170).

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Anggaran penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Penelitian Terdahulu

Karamoy (2013) mengenai evaluasi pelaksanaan system dan prosedur pemerintahan kas pada dinas pendapatan kota Manado, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan system dan prosedur penerimaan kas serta mengevaluasi system dan penerimaan kas pada dinas pendapatan kota Manado. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode Deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara keseluruhan system dan prosedur kas sudah memadai. Tamalumu (2012) mengenai Penerapan Akuntansi Penerimaan Dana Transfer Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe, metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa system dan prosedur penerimaan kas pada dinas pendapatan pengelolaan, keuangan dan asset kabupaten kepulauan sangihe tidak sesuai dengan peraturan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan teknik atau metode melalui data tertulis dan data tidak tertulis yang diperoleh dengan cara penelitian lapangan yang merupakan langkah pengumpulan data dengan melakukan tinjauan langsung ke objek penelitian, dengan mengajukan surat permohonan kepada pihak terkait untuk dapat membantu selama proses penelitian untuk kepentingan penyusunan skripsi dengan memberikan data-data yang dibutuhkan. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang, yaitu pimpinan dan staff sehubungan dengan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Metode Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang dilakukan untuk menggambarkan keadaan responden dengan cara menguraikan data umum hasil penelitian kedalam bentuk angka/persentase dalam tabel.

Analisis Varians Pendapatan

Analisis varians dapat mengetahui tingkat efektivitas, dalam pencapaian target pendapatan.

1. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan serta kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu.

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan Thn } t - \text{Pendapatan Thn } t-1}{\text{Pendapatan Thn } t-1} \times 100\%$$

2. Analisis Rasio Keuangan

a. Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah} \times 100}{\text{Total Pendapatan daerah}}$$

b. Rasio Ketergantungan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer} \times 100\%}{\text{Total Pendapatan}}$$

c. Rasio Efektivitas Pendapatan

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Anggaran penerimaan PAD}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Varians

a. Varians Pendapatan

$$\text{Varians} = \text{Realisasi Tahun } t - \text{Anggaran Tahun } t$$

b. Presentase Varians Pendapatan

$$\text{Varians Pendapatan Tahun } T = \frac{\text{Realisasi Tahun } t}{\text{Anggaran Tahun } t} \times 100\%$$

Tabel 1. Varians Pendapatan

Tahun	Anggaran	Ralisasi	Varians Pendapatan
2007	543.565.887.843	525.469.031.150	-
2008	586.688.372.935	598.053.132.674	101,9%
2009	696.802.190.764	655.201.047.487	94%
2010	685.847.088.801	638.111.898.302	93%
2011	759.134.017.176	758.217.464.730	99,8%
Rata – Rata			77,74% %

Sumber : Hasil Olahan Tahun 2012

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan, analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja organisasi lain yang sejenis.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } t-1}{\text{Pendapatan Tahun } t-1} \times 100\%$$

Tabel 2. Pertumbuhan Pendapatan

Tahun	Pendapatan	Pertumbuhan
2007	525.469.031.150	-
2008	598.053.132.074	24,8%
2009	655.201.047.487	9,5%
2010	638.111.998.302	-2%
2011	758.217.464.730	18,8%
Rata – Rata		10,22

Sumber : Hasil Olahan Tahun 2012

Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 3. Derajat Desentralisasi

Tahun	PAD	Pendapatan	Rasio Derajat Desentralisasi
2007	3.110.082.302	525.469.031.150	-
2008	16.971.449.427	598.053.132.074	2,8%
2009	19.625.544.526	655.201.047.487	2,9%
2010	20.267.232.167	638.111.898.302	3,1%
2011	20.568.881.858	758.217.464.730	2,7%
Rata – rata			2,3%

Sumber : Hasil Olahan Tahun 2012

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah.

Rasio Ketergantungan Daerah

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100 \%$$

Tabel 4. Ketergantungan Daerah

Tahun	Pendapatan Transfer	Pendapatan Daerah	Ketergantungan Daerah
2007	2.080.579.557	525.469.031.150	-
2008	562.405.639.441	598.053.132.074	94%
2009	560.134.605.667	655.201.047.487	85,4%
2010	605.753.388.749	638.111.898.302	94,9%
2011	585.492.556.346	758.217.464.730	77,2%
Rata – Rata			70,3%

Sumber : Hasil Olahan Tahun 2012

Rasio ketergantungan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah.

Rasio Efektifitas PAD

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100 \%$$

Tabel 5. Efektivitas PAD

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Efektivitas PAD
2007	4.374.904.900	3.110.083.302	-
2008	14.340.132.935	16.971.449.427	118,3%
2009	16.775.385.000	19.625.544.526	116,9%
2010	19.366.109.887	20.568.881.858	104,6%
2011	20.513.688.719	20.568.881.858	100,2%
Rata – Rata			88%

Sumber: Hasil Olahan Tahun 2012

Rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan.

Pembahasan

Analisis Varians

Hasil penelitian dengan menggunakan Analisis Varians terlihat bahwa target anggaran belum tercapai sepenuhnya karena hanya pada tahun 2008 yaitu sebesar 101,9% target anggaran bisa tercapai atau bisa melampaui target anggaran yang ditetapkan. Walaupun tidak mencapai target yang ditentukan tetapi selisihnya kecil sehingga bisa dikatakan bahwa kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan tidak terlalu buruk. Untuk itu pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa selatan harus lebih memperhatikan lagi mengenai pendapatan dan mencari solusi terbaik agar supaya target pendapatan bisa terlampaui atau tercapai. Pemerintah harus memperhatikan kembali sumber-sumber pendapatan tersebut agar bisa melampaui target anggaran yang telah ditetapkan.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Pertumbuhan pendapatan Kabupaten Minahasa selatan bisa dikatakan baik, meskipun pada tahun 2010 sempat turun 3%. Untuk itu, pemerintah harus lebih mengoptimalkan hasil-hasil pendapatan. Komponen apa saja yang bisa memberikan peningkatan lebih terhadap pertumbuhan pendapatan untuk lebih di kembangkan lagi agar bisa meningkatkan pertumbuhan pendapatan tahun berikutnya.

Rasio Keuangan

a. Derajat Desentralisasi

Hasil dari analisis derajat desentralisasi pemerintah kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2008-2011 yaitu tahun 2008 derajat desentralisasi sebesar 2,8% kemudian pada tahun 2009 naik menjadi 2,9% tahun 2010 naik 3,1% tahun 2011menurun menjadi 2,7% dan rata-ratanya sebesar 2,3%. Derajat desentralisasi kabupaten Minahasa Selatan dapat dikatakan masih rendah. Ini berarti kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten Minahasa Selatan untuk menggali dan mengelola pendapatan masih rendah. Untuk itu kedepannya kabupaten Minahasa Selatan harus lebih berupaya untuk dapat meningkatkan PAD baik dengan menggali potensi baru ataupun mengembangkan potensi-potensi pendapatan yang sudah ada.

b. Ketergantungan Daerah

Hasil dari penelitian dengan analisis ketergantungan daerah pemerintah kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2008-2011 sebesar 94% kemudian tahun 2009 turun dari 94% menjadi 85,4% tahun 2010 naik sebesar 94,9% kemudian tahun 2011 turun dari 94,9% menjadi 77,2% dan rata-ratanya 70,3%. Dari analisis tersebut terlihat bahwa pemerintah kabupaten Minahasa Selatan masih

bergantung kepada pemerintah pusat. Untuk itu perlu adanya usaha dari pemerintah kabupaten Minahasa untuk mengurangi ketergantungan atas dana transfer dari pemerintah pusat.

c. Efektivitas Pendapatan

Efektivitas pendapatan kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2008-2011 yaitu tahun 2008 sebesar 118,3%, kemudian pada tahun 2009 menurun menjadi 116,9 % tahun 2010 menurun menjadi 104,6% tahun 2011 menurun menjadi 100,2% dan rata-rata efektivitas pendapatannya sebesar 88%. Dari analisis tersebut terlihat bahwa efektivitas pendapatan kabupaten Minahasa Selatan tergolong sangat efektif karena rata-rata efektivitas pendapatannya sebesar 88%. Dari analisis tersebut terlihat bahwa pemerintah kabupaten Minahasa Selatan sangat efektif dalam merealisasikan pendapatannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Kinerja Pendapatan Pemerintah Kabupaten Minahasa dilihat dari analisis varians, dari tahun 2008-2011 belum tercapai atau terlampaui target anggarannya. Hanya pada tahun 2008 target anggaran yang bisa tercapai atau terlampaui.
2. Kinerja pendapatan Pemerintah Kabupaten Minahasa dilihat dari analisis pertumbuhan pendapatan dari tahun 2007-2011 cukup baik. Meskipun sempat turun tetapi pertumbuhan pendapatan bisa kembali normal.
3. Kinerja pendapatan dilihat dari analisis rasio keuangan yaitu dari derajat desentralisasi kabupaten Minahasa masih rendah dan masih cenderung menurun, Pemerintah Kabupaten Minahasa juga masih tergantung pada Pemerintah pusat dilihat dari analisis ketergantungan, sedangkan menurut analisis rasio efektivitas pendapatan asli daerah tergolong sangat efektif dalam merealisasikan pendapatannya.

Saran

Saran yang disampaikan bagi pimpinan Dinas Pengelolaan Keuangan, Asset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa untuk dapat memperhatikan dan meningkatkan lagi pendapatan yang ada di daerah Kabupaten Minahasa. Dengan menggali potensi-potensi baru sehingga bisa meningkatkan lagi penerimaan pendapatan pada sumber-sumber pendapatan yang sudah ada untuk ditingkatkan lagi kinerjanya agar penerimaan pajak kian hari kian meningkat. Pemerintah harus lebih mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi masing-masing serta melakukan pengawasan secara sistematis untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan PAD oleh aparat pemerintah. Serta mencari solusi terbaik supaya setiap wajib pajak bisa membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisamita, Rahardjo. 2011. *Pengelola Pendapatan & Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Bastian, 2006. *Pengelola Pendapatan & Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Halim Abdul. 2012 *Akuntansi Sektor Publik* Yogyakarta
- Karamoy, Rone Lucia. 2013. Pelaksanaan System dan Prosedur Penerimaan Kas pada Dinas Pendapatan Kota Manado. <http://ejournal.unsrat.ac.id>. Jurnal Emha Vol.1 No. 3. Diakses 7 Maret 2016. Hal.939-948.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.

- Nafarin, 2007. *Penyusunan Anggaran Daerah*. Refika Aditama, Bandung.
- Nordiawan, Dedy. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Tamalumu, Jendra. 2012. Penerapan Akuntansi Penerimaan Dana Transfer Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe. <http://ejournal.unsrat.ac.id>. Jurnal EMBA 605 Vol. 2. No.01 Tahun 2015. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Diakses 8 Maret 2016. Hal. 595-715.

